



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON
MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 7 Juli 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2010 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Perancis, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Perancis, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 33



**REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN**

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH FEDERAL SWISS

MENGENAI

**PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss, selanjutnya disebut
"Para Pihak".

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan bersahabat tersebut dengan memfasilitasi
masuknya pemegang paspor diplomatik atau dinas Konfederasi Swiss dan Republik
Indonesia;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Konfederasi Swiss untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal pertama masuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pada saat memasuki wilayah Swiss setelah transit melalui wilayah satu atau lebih negara yang memberlakukan seluruh ketentuan Schengen mengenai lintas batas dan visa, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal pertama melintasi perbatasan yang membatasi wilayah yang terbentuk oleh negara dimaksud.

2. Warga Negara Swiss, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, sejak setiap tanggal masuk.

PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN NASIONAL

1. Warga Negara Para Pihak wajib mematuhi peraturan mengenai masuk dan tinggal dan perundang-undangan nasional yang berlaku di wilayah Pihak lainnya selama tinggal di wilayah Pihak lainnya tersebut.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan Para Pihak yang berlaku yang terkait dengan keamanan and masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang dianggap tidak dikehendaki atau dapat membahayakan ketentraman publik, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

PASAL 4

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.

PASAL 5

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

1. Warga Negara Indonesia pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Konfederasi Swiss wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Konfederasi Swiss sebelum memasuki wilayah pihak tersebut. Anggota keluarga dari warga negara tersebut yang merupakan Warga Negara Indonesia dan memegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, yang tinggal dalam satu rumah tangga yang sama dan diakui oleh Pemerintah Swiss sebagai anggota keluarga wajib dipersyaratkan pula untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Konfederasi Swiss.
2. Warga Negara Swiss pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler di wilayah Republik Indonesia wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum memasuki wilayah pihak tersebut. Anggota keluarga dari warga negara tersebut yang merupakan Warga Negara Swiss dan memegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, yang tinggal dalam satu rumah tangga yang sama dan diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota keluarga wajib dipersyaratkan pula untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.

PASAL 6

PERTUKARAN CONTOH PASPOR

1. Pihak berwenang dari Para Pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, pihak berwenang dari Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan mengirimkan contoh-contoh paspor tersebut tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 7

PASPOR RUSAK ATAU HILANG

Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah Pihak lainnya, misi diplomatik dan pos konsuler dari warga negara yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan perundang-undangan nasional, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya dan dalam waktu bersamaan memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik maupun alasan-alasan penting lainnya.
2. Penangguhan tersebut wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Penangguhan tersebut wajib berlaku sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Pihak lainnya. Pihak yang menangguhkan berlakunya persetujuan ini wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya pada saat penangguhan dihentikan.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dari Persetujuan ini dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-undangan nasionalnya, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

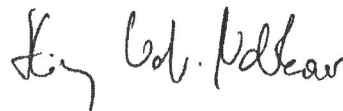
DIBUAT di Jakarta , pada tanggal 7 Juli 2010 ,rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH FEDERAL
SWISS**



Heinz Walker-Nederkoorn
Duta Besar Swiss untuk Indonesia



REPUBLIK INDONESIA

Accord

entre

le Gouvernement de la République d'Indonésie

et

le Conseil fédéral suisse

sur la suppression réciproque de l'obligation du visa

pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

Le Gouvernement de la République d'Indonésie

et

le Conseil fédéral suisse (ci-après : les Parties contractantes),

considérant les relations amicales entre les Parties contractantes,

désireux de renforcer encore leurs relations amicales en facilitant l'entrée sur leurs territoires respectifs des titulaires d'un passeport diplomatique ou de service de la République d'Indonésie ou de la Confédération suisse,

en vertu des lois et réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs,

conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DU VISA

1. Les ressortissants indonésiens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable n'ont pas besoin d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n'excédant pas 90 (nonante) jours, à compter de la date de la première entrée, par période de 6 (six) mois.

Lorsque l'entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l'Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l'espace formé par ces Etats.

2. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable n'ont pas besoin d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la République d'Indonésie, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n'excédant pas 30 (trente) jours, à compter de la date de chaque entrée.

ARTICLE 2

DURÉE DE VALIDITÉ DES PASSEPORTS

La durée de validité d'un passeport diplomatique ou de service des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes doit être d'au moins 6 (six) mois à compter de la date d'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 3

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION NATIONALE

1. Les ressortissants des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l'entrée et le séjour, ainsi qu'à toute la législation en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante pendant leur séjour.
2. Le présent accord n'affecte pas les lois et les réglementations en vigueur des Parties contractantes concernant la sécurité nationale et l'entrée, le séjour et le mouvement des étrangers.
3. Les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou d'abrégier le séjour de personnes considérées comme indésirables ou susceptibles de présenter un danger pour la paix publique, l'ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale.

ARTICLE 4

CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable de l'une des Parties contractantes peuvent entrer sur le territoire du pays de l'autre Partie contractante ou quitter ce territoire en tout point autorisé à cet effet par les autorités compétentes en matière d'immigration, sans aucune restriction à l'exception de celles prévues dans les dispositions relatives à la sécurité, aux migrations, aux douanes, à la santé ou dans d'autres dispositions qui peuvent être légalement appliquées aux titulaires de tels passeports valides.

ARTICLE 5

VISA POUR LES MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

1. Les ressortissants indonésiens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable et qui sont désignés comme faisant partie d'une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la Confédération suisse sont tenus d'obtenir un visa d'entrée approprié auprès de l'Ambassade de la Confédération suisse avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants indonésiens visés plus haut qui sont des ressortissants indonésiens et sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités suisses sont également tenus d'obtenir un visa d'entrée approprié auprès de l'Ambassade de la Confédération suisse.

2

19

2. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable et qui sont désignés comme faisant partie d'une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la République d'Indonésie sont tenus d'obtenir un visa d'entrée approprié auprès de l'Ambassade de la République d'Indonésie avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants suisses visés plus haut qui sont des ressortissants suisses et sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités indonésiennes sont également tenus d'obtenir un visa d'entrée approprié auprès de l'Ambassade de la République d'Indonésie.

ARTICLE 6 NOTIFICATION DES SPECIMENS

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.
2. En cas d'introduction d'un nouveau passeport diplomatique ou de service, de même qu'en cas de modifications des passeports existants, les autorités compétentes de la Partie contractante concernée informent les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, de tout changement apporté à ces documents et transmettent les nouveaux spécimens au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation officielle.

ARTICLE 7 PERTE OU DEGRADATION DE PASSEPORTS

Au cas où un ressortissant de l'une des Parties contractantes perd ou endommage son passeport diplomatique ou de service sur le territoire du pays de l'autre Partie contractante, la mission diplomatique ou le bureau consulaire du pays dont il a la nationalité émettra pour la personne concernée, conformément à la législation de son pays, un document lui permettant de retourner dans le pays de sa nationalité et informera simultanément l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.

ARTICLE 8 SUSPENSION

1. Chaque Partie contractante se réserve le droit, pour des raisons de sécurité d'Etat, d'ordre public, de santé publique, ou d'autres raisons graves, de suspendre l'application de tout ou partie des dispositions du présent Accord.
2. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par la voie diplomatique, à l'autre Partie contractante. Elle prend effet à la date de réception de cette notification par l'autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l'application du présent Accord informe immédiatement l'autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension.

ARTICLE 9 AMENDEMENTS

Le présent Accord peut être amendé ou révisé si les deux Parties contractantes conviennent mutuellement par écrit qu'une modification est nécessaire. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 du présent Accord et constitue une partie intégrante du présent Accord.

ARTICLE 10 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout litige ou différend découlant de l'application des dispositions du présent Accord sera résolu à l'amiable par des consultations ou des négociations entre les Parties contractantes.

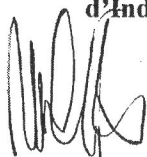
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DE VALIDITÉ ET DÉNONCIATION

1. Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins qu'une Partie contractante décide de le dénoncer en notifiant sa décision par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Partie contractante, au moins 30 (trente) jours avant la date prévue pour la dénonciation.

En foi de quoi les deux soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

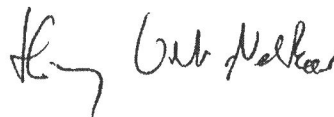
Fait à Jakarta, le 7 Juillet en 2010 deux exemplaires, en langue indonésienne, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République
d'Indonésie



R.M. Marty M. Natalegawa
Ministre des Affaires Étrangères

Pour le Conseil fédéral suisse



Heinz Walker-Nederkoorn
Ambassadeur de Suisse en Indonésie



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE SWISS FEDERAL COUNCIL

ON MUTUAL VISA EXEMPTION

FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and The Swiss Federal Council, hereinafter referred to as "**the Contracting Parties**".

CONSIDERING the friendly relations between the Contracting Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations by facilitating the entry into their territories of holders of diplomatic or service passports of the Swiss Confederation and the Republic of Indonesia;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows :

ARTICLE 1

VISA EXEMPTION

1. Indonesian nationals, holding a valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Swiss Confederation for a period not exceeding 90 (ninety) days from the date of first entry within a 6 (six) months period.

When entering the territory of Switzerland after having transited through the territory of one or more States which applies all provisions of the Schengen Acquis concerning border crossing and visa, the period of 90 (ninety) days shall begin to run as of the date of the crossing of the external border limiting the area formed by the aforesaid States.

2. Swiss nationals, holding a valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days, counted from the date of each entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of a diplomatic or service passport validity of nationals of either Contracting Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the country of the other Contracting Party.

ARTICLE 3
COMPLIANCE WITH THE NATIONAL LEGISLATION

1. Nationals of either Contracting Party shall comply with the entry and stay regulations and the national legislation in force in the territory of the other Contracting Party throughout the duration of their stay.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the Contracting Parties relating to the internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. The Contracting Parties reserve the rights to refuse admission to or shorten the stay of persons considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Holders of valid diplomatic or service passports of either Contracting Party referred to in this Agreement, may enter into and depart from the territory of the country of the other Contracting Party, at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions which may be legally acceptable to holders of such valid passports.

ARTICLE 5
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

1. Indonesian nationals who are holders of a valid diplomatic or service passport and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the Swiss Confederation shall be required to obtain an appropriate entry visa from the Embassy of the Swiss Confederation prior to their entry. Family members of the abovementioned nationals who are Indonesian nationals and hold a valid Indonesian diplomatic or service passport, who are living in the same household and are recognized by the Swiss Authorities as family members shall also be required to obtain an appropriate entry visa from the Embassy of the Swiss Confederation.

2. Swiss nationals who are holders of a valid diplomatic or service passport and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the Republic of Indonesia shall be required to obtain an appropriate entry visa from the Embassy of the Republic of Indonesia prior to their entry. Family members of the abovementioned nationals who are Swiss nationals and hold a valid Swiss diplomatic or service passport, who are living in the same household and are recognized by the Indonesian Authorities as family members shall also be required to obtain an appropriate entry visa from the Embassy of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 6 EXCHANGE OF SPECIMENS

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their respective passports within 30 (thirty) days after signing this Agreement.
2. In case of introduction of a new diplomatic or service passport, as well as modifications of the existing ones, the competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and send the new specimens not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

ARTICLE 7 LOSS OR DAMAGE OF PASSPORTS

In case that nationals of either Contracting Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the country of the other Contracting Party, the diplomatic mission or consular office of their nationality shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality and simultaneously inform the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 8 SUSPENSION

1. Each Contracting Party reserves the right to suspend the provision of this Agreement, in whole or in part, for reasons of protection of state security, public order, public health or other serious reasons.
2. Such suspension shall immediately be notified through diplomatic channels to the other Contracting Party. Such suspension shall enter into force from the date of the receipt of the notification by the other Contracting Party. The Contracting Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the other Contracting Party once the reasons for suspension no longer exist.

**ARTICLE 9
AMENDMENTS**

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Contracting Parties. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of paragraph 1 of Article 11 of this Agreement and form an integral part of this Agreement.

**ARTICLE 10
DISPUTES SETTLEMENT**

Any differences or disputes arising out of the implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Contracting Parties.

**ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Contracting Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Contracting Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Jakarta, on 7 July 2010, in two originals, each in the Indonesian, French, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



R.M. Marty M. Natalegawa
Minister of Foreign Affairs

**FOR THE SWISS FEDERAL
COUNCIL**



Heinz Walker-Nederkoorn
Ambassador of Switzerland to Indonesia